

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD Tahun 2017 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, dengan pelibatan 4 (empat) actor pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas berbasis masyarakat dengan memperhatikan pada pijakan law and regulation. Keterlibatan para aktor pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi diharapkan dapat menciptakan sinergi dan harmoni di setiap tingkatan pembangunan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro untuk tahun yang sama, penyusunan KUA-APBD, dan PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2017. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2017, difokuskan pada pemenuhan janji gubernur, pencapaian akumulasi target RPJMD 2013-2018, penuntasan pembangunan monumental yang belum selesai, dan pembangunan yang bersifat strategis lintas kabupaten/kota.

RKPD Tahun 2017 memiliki makna penting dan strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dapat dilihat dari capaian: (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek pelayanan umum; dan (3) aspek daya saing daerah.

Kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 diharapkan dapat berkontribusi dalam konstelasi nasional berikut.

1. Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
2. Menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi penanaman modal asing (PMA); dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jawa Barat, menciptakan iklim investasi yang baik secara nasional.
3. Menjadi provinsi dengan jumlah koperasi aktifter banyak.
4. Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua dalam kontribusi produksi padi (GKG) nasional.
5. Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap penyediaan daging sapi, telur, susu, dan ayam di tingkat nasional.
6. Jawa Barat sebagai produsen utama perikananbudidaya di Indonesia.
7. Jawa Barat sebagai pemilik sertifikat tenaga terampil untuk keahlian konstruksi secara nasional.
8. Provinsi yang merealisasikan pembangunan rumah susun sederhana dan rumah siap huniter banyak di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman Tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas

pada tahun anggaran 2017, perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Sinergi multi pihak dalam rangka percepatan pembangunan berbagai infrastruktur strategis.
2. Pembangunan 3 (tiga) metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan yang berperan sebagai penghela percepatan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, sejalan dengan sinergi pembangunan pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Upaya mewujudkan hasil pembangunan yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini didorong untuk menghindari kondisi menumpuknya tagihan pembayaran pekerjaan pada akhir triwulan IV.
4. Koordinasi yang efektif, antar OPD/Biro dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih cepat tercapai.
6. Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas, isu strategis, prioritas pembangunan, program prioritas, dan program pembangunan, serta kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2017, dirumuskan melalui inovasi perencanaan sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 yang dirumuskan melalui pendekatan perencanaan holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial.
 - a. Holistik-tematik dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, rujukan pembangunan berkelanjutan, guna membangun pondasi dan payung bagi aktivitas multi pelaku secara luas, dan diarahkan untuk menjawab tuntutan kinerja pemerintah daerah.
 - b. Terintegrasi dimaknai bahwa sasaran prioritas pembangunan harus bisa dicapai melalui sinergi lintas pelaku berbasis rencana aksi multi pihak implementasi pekerjaan (RAM-IP). Prioritas pembangunan merupakan hasil konsolidasi dan pemetaan program/kegiatan substansial yang akan dikerjakan oleh OPD dan bersifat akomodatif terhadap proses perubahan kewenangan.
 - c. Spasial dimaknai bahwa aspek lokasi/kewilayahan telah dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan melalui pendekatan berbasis tata ruang dan analisis kebutuhan.

2. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2017 ditunjang dengan pelaksanaan Virtual Musrenbang. Virtual Musrenbang merupakan dialog interaktif melalui media teleconference antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota Jawa Barat yang disaksikan secara langsung oleh pimpinan DPRD, unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta elemen masyarakat. Keunggulan dari Virtual Musrenbang ini, antara lain meningkatkan partisipasi peserta teleconference, menghemat anggaran, serta menunjang akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui proses dokumentasi secara audio-visual dan digital.

Selain inovasi dalam perencanaan, juga diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan terhadap hal-hal mendesak yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,

yaitu mengurangi tingkat kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan dan dikembangkan inovasi Decision Support System (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan) yang memiliki fungsi pencarian dan analisis terkait data rumah tangga miskin di Jawa Barat. Sistem ini diberi nama Seeker and Analyzer Pro Poor (SAAPP).

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, demi mewujudkan kemantapan pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN